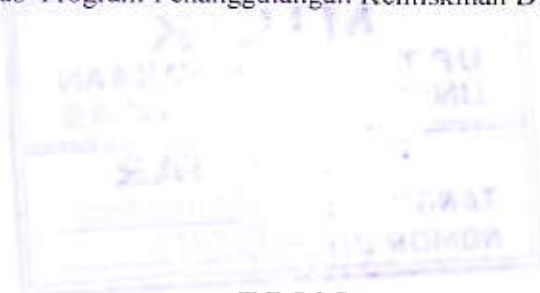


**EFEKTIFITAS MODAL DANA BERGULIR DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)**
Studi kasus Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang



TESIS

Oleh :

SYAHRIAL

03 202 001



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

**EFEKTIFITAS MODAL DANA BERGULIR DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)**
(Studi kasus Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang)

Oleh : Syahrial

(Di bawah bimbingan Endry Martius dan Fuad Madarisa)

Ringkasan

Program penanggulangan kemiskinan hampir selalu memiliki kegiatan penguatan ekonomi rumah tangga melalui skema pinjaman modal dana bergulir (*revolving fund*) yang dipandang efektif dapat meningkatkan pendapatan. Pelaksanaan sistem dana bergulir di berbagai program kemiskinan terdahulu mengalami kegagalan karena salah sasaran, salah penggunaan, realisasi dana yang lama dan terkesan berbelit-belit, pada akhir terjadi macet pengembalian kredit. Kondisi ini menunjukna bahwa modal dana bergulir tidak efektif terhadap penanggulangan kemiskinan. Berangkat dari penggalaman sebelumnya banyak pihak merasa pesimis penguatan ekonomi rumah tangga miskin dalam Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kota Padang akan mengalami nasib serupa.

Penelitian ini bertujuan melihat efektifitas pinjaman modal dana bergulir dan sistem pengelolaanya dalam mengatasi persoalan kemiskinan pada dua kelurahan di Kota Padang. Adapun variabel penelitian dari efektifitas meliputi ; tepat sasaran, waktu pencairan, penggunaan dana bergulir sesuai dengan proposal usaha yang diajukan dan manfaat dana bergulir terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga miskin. Sedangkan variabel dari pengelolaan modal dana bergulir meliputi ; kemampuan lembaga pengelola dalam menjalankan aturan dan sanksi, persepsi masyarakat, sistem pengembalian dan pengguliran pada penerima manfaat berikutnya.

Pengelolaan modal dana bergulir (*revolving fund*) dipercaya pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang pilih langsung oleh masyarakat kelurahan. Kemampuan BKM Bina Bersama Kelurahan Pampangan XX dan BKM Alang Laweh Saiyo di Kelurahan Alang Laweh dalam mengelola modal dana bergulir cukup baik. Hal ini dapat dilihat besarnya pengembalian dana bergulir oleh kelompok ke UPK-BKM, di Pampangan terdapat (96%) dan Alang Laweh (90%) pengembalian kredit

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan perkotaan di Indonesia cukup mengkhawatirkan bagi semua pihak dengan jumlah penduduk miskin di kota yang terus bertambah. Perkembangan kemiskinan perkotaan yang diakibatkan oleh krisis moneter terjadinya lonjakan kemiskinan yang sangat tinggi, dari sebanyak 7,2 juta (9,7%) pada tahun 1996 meningkat menjadi 17,2 juta (21,9%) pada tahun 1998. Berbagai upaya dan tindakan mengatasi kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 sudah agak sedikit menurun, yaitu menjadi 15,7 juta atau 19,5% dari jumlah penduduk perkotaan keseluruhannya (BPS, 2002). Namun jumlah maupun persentase penduduk miskin perkotaan ini masih lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1996 sebelum terjadinya krisis moneter. Perkembangan jumlah penduduk miskin mulai tahun 2000 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin perkotaan, ini karena adanya intervensi pemerintah dalam mengatasinya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta atau setara dengan 17,75% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah kemiskinan di perkotaan sebesar 14,2 juta atau 13,4% dari total kemiskinan di Indonesia. Besarnya jumlah kemiskinan di perkotaan tidak lepas dari tingginya arus urbanisasi dan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sehubungan dengan itu, kecenderungan yang terjadi di Indonesia dimana jumlah maupun proporsi penduduk perkotaannya telah cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1961 jumlah penduduk perkotaan baru sebesar 14,3 juta, selanjutnya meningkat terus, misalnya di tahun 1971 menjadi 20,5 juta, tahun 1980 sebesar 32,8 juta, tahun 1990

sebesar 55,5 juta, tahun 2000 sebesar 85,8 juta, tahun 2003 sebesar 97,9 juta dan tahun 2006 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia diperkirakan/diproeksi menjadi 111,8 juta (50,8%) dari total penduduk Indonesia pada tahun 2003 (BPS, 2003).

Masalah kemiskinan merupakan ancaman kemanusiaan yang perlu ditanggulangi secara serius. Upaya mengangkat dan mementingkan martabat manusia terhadap ancaman kemanusiaan tersebut terefleksi dalam hakikat dari pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat miskin di pedesaan maupun di perkotaan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan ditandai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro, bahwa pembangunan yang dapat dikatakan berhasil dengan memenuhi tiga (3) dari unsur pokok dalam pembangunan yang meliputi : 1). Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic need*), 2). Meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia dan 3). Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. (Todaro dalam Arsyad Lincoln, 1999).

Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan terus berlangsung dan umumnya hanya bersifat *ad hoc*, sehingga kemiskinan tetap saja menjadi masalah sosial dalam pembangunan. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional mengatasi masalah kemiskinan seperti, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Peningkatan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), jaringan pengamanan sosial (*social safety net*), Beras Miskin, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Kredit Usaha Tani (KUT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah berupaya mengungkapkan efektifitas dan pengelolaan pinjaman modal dana bergulir dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Padang. Skema pinjaman modal dana bergulir dalam mengembangkan usaha ekonomi rumah tangga miskin merupakan salah satu Tridaya pembangunan yang mampu mengangkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Pampangan Nan XX dan Alang Laweh. Pinjaman modal dana bergulir yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di dua kelurahan cukup berkembang dan dapat digulirkan kepada kelompok KK miskin berikutnya. Selanjutnya dari dua kelurahan yang diteliti terhadap efektifitas dan pengelolaan modal dana bergulir dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan dana bergulir oleh BKM yang dipilih langsung oleh masyarakat kelurahan cukup berjalan baik. Proses pengelolaan dana bergulir oleh BKM Bina Bersama di Kelurahan Pampangan Nan XX dilakukan oleh UPK untuk menyalurkan dana P2KP tahap I sebesar Rp 96 juta kepada 19 KSM dengan jumlah 196 KK miskin, besar pinjaman setiap KKnya Rp 500.000,-. Selanjutnya UPK juga berhasil melakukan penguliran kredit modal bergulir sebesar Rp 54 juta kepada 5 KSM baru dan 5 KSM lama dengan jumlah penerima manfaat sebanyak KK 96 dengan jumlah pinjaman yang bervariasi antara Rp 500.000 s/d 1 juta per

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincold, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Jogjakarta.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, UNDP (2004), *The Economic Of Democracy, Financing Human Development In Indonesia, National Human Development Report*, Jakarta
- Buku Pandoman umum P2KP – III tahun 2005
- Biro Pusat Statistik, 2002. *Data dan informasi kemiskinan*, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, 2004, *Data Kemiskinan Sumatera Barat*
- Biro Pusat Statistik, 2006, *Sumatera Barat Dalam Angka*
- Chadwick, A. and Bruce, Bahr. Howard, 1991 *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* IKIP Semarang Press.
- Cernea, Michael.M, (1990), *Pemukiman Penduduk Secara Terpaksa dalam Proyek-Proyek Pembangunan, Pedoman Kebijakan yang di Biayai oleh Bank Dunia*, Washington D.C, World Bank.
- (1988), *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Chambers Robert, 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang* LP3ES. Jakarta.
- Elfindri (2002), *Ekonomi Patron – Clie: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*, Padang, Penerbit Universitas Andalas.
- Effendi Sofyan, Sairin Sjafrin dan Dahlan Alwi, 1996. *Membangun Martabat Manusia peranan ilmu-ilmu social dalam pembangunan*, Gajah Mada University Press dan HIPIIS Cabang Yogyakarta.
- (2003), *Ekonomi Layanan Kesehatan*, Padang, Penerbit Universitas Andalas.
- Faisal, Sanapiah, 2001. *Format – Format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch, 2002. *Utang Yang Memiskinkan*, studi kasus proyek Bank Dunia di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. ICW. Jakarta